



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. FATAH
2. Jabatan : KEPALA BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
3. NHK : 931989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.420 m²/200 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1.035 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m²/50 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 2.455 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 601 m²/60 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 3.830 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 3.763 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 33.000.000

1. MOTOR, HONDA PRIMA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



3.	MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.		
	5.000.000		
4.	MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.		
	8.000.000		
5.	MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.		
	12.000.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.276.507
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total		Rp.	2.893.276.507
III. HUTANG		Rp.	364.160.730
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	2.529.115.777

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.